**Refleksi Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi: Tinjauan Format Relasi Presiden-DPR**

Asran Jalal[[1]](#footnote-0)

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengulas refleksi 3 (tiga) tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa masa pemerintahan Presiden Jokowi relasi Presiden dengan DPR tidak terjadi konflik? Bagaimana strategi pemerintahan Presiden Jokowi mengelola relasi dengan DPR? Teori Scott Mainwaring mengatakan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem banyak partai dapat menimbulkan konflik Presiden dengan parlemen. Masa Presiden Jokowi selama 3 (tiga) tahun pemerintahannya tidak terjadi konflik dengan DPR. Faktornya adalah pemerintahan Presiden Jokowi memiliki basis dukungan partai-partai yang kuat di DPR, kemampuannya memelihara dukungan partai pendukung utama dan kemampuannya memperluas dukungan dari partai-partai politik lainnya. Prospek relasi pemerintahan Presiden Jokowi dengan DPR tergantung pada hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri dan kemampuannya memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung lainnya. Kemampuannya untuk merawat hubungan dimaksud, memberi peluang pada pemerintahan Presiden Jokowi untuk memenangkan Pilres tahun 2019. Implikasi teori yang dimunculkan adalah konflik antara Presiden dengan parlemen dalam sistem presidensial dengan kombinasi sistem banyak partai bisa dihindari, apabila Presiden memiliki modal politik yang kuat di DPR, mampu memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung utama dan mampu memperluas dukungan dari partai politik lainnya.

Kata Kunci: Konflik, relasi Presiden Jokowi-DPR

**Pendahuluan**

Format relasi Presiden-DPR dalam perpolitikan Indonesia mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan format sistem politiknya. Masa Orde Baru yang dikenal dengan sistem otoriternya, kecenderungan yang terjadi dalam format relasi Presiden-DPR bersifat stabil, dalam arti selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak pernah muncul konflik yang mencuat kepermukaan antara Presiden dengan DPR. DPR sebagai lembaga perwakilan rakayat selalu mendukung berbagai kebijakan-kebijakan Presiden. DPR pada masa ini sering disebut sebagai lembaga perwakilan yang hanya berfungsi mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

Semenjak reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, salah satu perobahan yang tampak adalah format relasi Presiden-DPR bersifat konflik. Konflik yang dimaksud adalah perbedaan pandangan antara Presiden dan DPR mengenai suatu kebijakan tertentu. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, konflik Presiden dengan DPR mulai muncul antara lain dalam kasus pembubaran Departemen Sosial (Depsos) dan Departemen Penerangan (Deppen). Kebijakan ini dikritisi DPR, menganggap kebijakan tersebut membuat masalah baru dalam kehidupan sosial politik masyarakat.[[2]](#footnote-1)

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, salah satu kasus yang menandai konflik Presiden dengan DPR adalah kasus Divestasi PT Indosat, dalam masalah ini beberapa fraksi DPR sempat mengusulkan hak angket untuk mengungkap kasus tersebut, meskipun kemudian usulan hak angket tidak jadi dilaksanakan, karena tidak mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lainnya.

Masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hasil Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung pada tahun 2004, melahirkan model relasi Presiden dengan DPR diwarnai situasi konflik. Tahun 2005-2008 pemerintahan SBY-JK mendapat sebanyak 14 (empat belas) kali usulan hak interpelasi dari DPR untuk mempertanyakan dan menggugat kebijakan pemerintah. Pada periode yang sama pemerintahan SBY-JK memperoleh sebanyak 8 (delapan) kali hak Angket dari DPR. Hak interpelasi dan angket dimaksud membuktikan betapa situasi ketegangan terjadi antara Presiden SBY dengan DPR. [[3]](#footnote-2)

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (pemerintahan Presiden Jokowi), semenjak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, belum pernah mengalami konflik dengan DPR. Kecenderungan yang tampak adalah format relasi DPR Presiden bersifat stabil, hal ini berbeda dengan pemerintahan reformsi sebelumnya yakni masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Mengapa masa pemerintahan Presiden Jokowi relasi Presiden dengan DPR tidak terjadi konflik? Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi mengelola relasi dengan DPR?

 Pandangan para ahli ilmu politik menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan sistem presidensial adalah menimbulkan konflik dalam relasi Presiden dengan Parlemen dan mengancam demokrasi. Menurut Arend Lijphart, salah satu kelebihan dari pemerintahan presidensial antara lain adalah stabilitas eksekutif, karena masa jabatan Presiden bersifat tetap (*fixed term).* Sebaliknya, salah satu kelemahan dari sistem presidensial adalah masalah konflik eksekutif dengan legislatif yang dapat mengarah kepada jalan buntu (*deadlock*).[[4]](#footnote-3) Scott Mainwaring, kombinasi sistem mutipartai dengan sistem presideansial dapat menciptakan kesulitan dan konflik dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif dan mengancam stabilitas demokrasi.[[5]](#footnote-4) Dikemukakannya;

*“‘The combination multi- party system and presidentialism is inconducive to democratic stability because it easily creates difficulties in the relationship between the president and the conggress. To be effective, goverment must be able to push through policy measures, which is difficult to do when the executive faces a sizeable majority opposition in the legislature. And conflict between the executive and the legislature is frequent when different parties control the two branches*.”

(“Kombinasi sistem multi-partai dan sistem presidensial tidak kondusif untuk stabilitas demokrasi karena hal itu mudah menciptakan kesulitan dalam hubungan Presiden dengan kongres. Untuk menjadi efektif, pemerintah harus mampu untuk mendorong langkah-langkah kebijakan, yang sulit untuk dilakukan adalah ketika Presiden menghadapi mayoritas oposisi di legislatif. Konflik eksekutif dan legislatif dapat terjadi ketika partai-partai yang berbeda mengontrol kedua cabang tersebut.”)

**Dinamika relasi Presiden DPR Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid yang terpilih menjadi Presiden melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, relasi Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR berada dalam situasi konflik. Salah satu isu yang muncul ke publik adalah kasus Dana Yanatera Bulog dan dana sumbangan dari Sultan Brunei. Kedua kasus dimaksud dikenal dengan istilah ‘*Buloggate*’ dan ‘*Bruneigate*’.)

Kasus Bulog Gate merupakan kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kasus ini melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya. Presiden Abdurrahman Wahid beranggapan bahwa Bulog sebagai badan yang bergerak di bidang logistik dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terkait dengan logistik baik itu dalam bidang sosial budaya, ekonomi maupun politik. Presiden dengan leluasa dapat menggunakan dana dan materi dari Bulog dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul. DPR menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid kurang tepat karena berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.

Kasus Bruneigate ini merupakan kasus penyaluran dana Sultan Brunei  yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Abdurrahman Wahid, yakni Ario Wowor. Dana tersebut kemudian disimpan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam rekening pribadinya Menurut Presiden, bahwa Sultan Brunei memintanya untuk merahasiakan dana tersebut, sehingga menyimpan dana itu sendiri tanpa diketahui oleh publik. DPR menganggap bahwa dana dari Sultan Brunei mesti masuk dalam rekening negara, bukan rekening pribadi, dan menganggap Presiden Abdurrahman Wahid sudah melakukan tindak pidana korupsi

Konflik Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR kasus dana Buloggate dan Bruneigate ini, akhirnya DPR penggunaan hak angket pada tanggal 28 Agustus 2000, guna menyelidiki kasus tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan DPR adalah mengajukan memorandum I dan memorandum II kepada Presiden Abdurahman Wahid. Presiden kemudian merespon langkah-langkah DPR ini dengan mengeluarkan sebuah Dekrit yang isinya meliputi: (1) membubarkan DPR/MPR; (2) membubarkan Partai golkar; (3) mempercepat pemilihan umum.

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid direspon DPR dengan mengundang MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR. Atas usulan DPR, MPR mengadakan Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001, keputusan yang dihasilkan adalah memberhentikan Presiden Abdurrahman wahid dari Presiden RI, dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil Presiden.

Faktor penyebab munculnya relasi Presiden-DPR dengan format konfliktual pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid berkaitan dengan sistem pemilihan Presiden yang bersifat tidak langsung yakni melalui MPR. Kewenangan MPR adalah memilih dan memberhentikan Presiden. Faktor institusional inilah yang mempengaruhi relasi Presiden-DPR bersifat konfliktual. Faktor lainnya adalah perubahan sistem politik dari sistem otoriter ke sistem refomasi juga berpengaruh kepada kedua lembaga ini, baik Presiden maupun DPR memiliki kebebasan untuk menggunakan kekuasaannya masing-masing. Sehingga argumen untuk mempertahankan pandangan masing-masing menjadi faktor pemicu semakin besarnya intensitas konflik antara kedua lembaga ini.

Faktor lainnya adalah partai pendukung utama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang lemah yakni PKB. Hasil Pemilu 1999 PKB hanya memiliki 51 (lima puluh satu) kursi di DPR dari 500 kursi (sekitar 10 %) . Jumlah tersebut jelas tidak memadai untuk memberi dukungan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Prilaku Presiden Abdurrahman Wahid yang selalu menganggap sepi suara DPR, merupakan faktor lain yang ikut mempengaruhi dan mempertajam konflik Presiden dengan DPR. Salah satu contoh adalah ucapan Abdurrahman Wahid yang mengatakan anggota DPR dengan istilah “Anak TK” pada acara rapat dengan DPR, merupakan contoh prilaku Presiden dimaksud.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, relasi Presiden dengan DPR sempat mengalami ketegangan, menyangkut beberapa isu antara lain adalah isu mengenai kasus divestasi PT. Indosat. Pihak pemerintah menganggap bahwa aset negara tersebut tidak menguntungkan dan terus merugi. Pemerintah mengambil kebijakan menjual sebagian saham kepada pihak asing. DPR beranggapan bahwa aset negara yang mempunyai prospek dan tidak perlu dijual pada pihak asing, pemerintah dapat menjadikannya sebagai salah satu BUMN. Sebagai tindak lanjut respon DPR terhadap kebijakan pemerintah, DPR pada tanggal 28 Agustus 2003 mengusulkan menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus tersebut. Hak angket dimaksud tidak berjalan, hal ini disebabkan kemampuan elite-elite PDIP sebagai pendukung utama Presiden Megawati Soekarnoputri mampu melakukan negosiasi dengan partai-partai lainnya. Aspek kekuatan PDIP di DPR hasil Pemilu 1999 hanya sebanyak 153 kursi dari 500 kursi DPR. Ini membuktikan kemampuan Elite-elite PDIP untuk memelihara dan memperluas dukungan dari partai lainnya merupakan faktor penting untuk menghindari dan meminimalisir situasi konflik Presiden Megawati Soekarnoputri dengan DPR.

Masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 2004-2008, relasi Presiden –DPR diwarnai dengan format konflik. DPR menggunakan 14 (empat belas) kali hak interpelasi yakni hak anggota DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden atas kebijakannya, dan 8 (delapan) kali menggunakan hak angket yakni hak anggota DPR unuk mengadakan penyelidikan terhadap keijakan yang dilakukan Presiden. Penggunaan kedua hak dimaksud menandakan relasi Presiden dan DPR berada dalam situasi konflik, karena terdapat perbedaan pandangan antara Presiden dan DPR mengenai suatu kebijakan yang sedang dan akan dijalankan oleh Presiden.

Tabel 1.1 Hak Interpelasi DPR masa Pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Waktu | Isu Interpelasi |
| 1 | 6 November 2005 | Penarikan Surat Presiden Megawati tentang Penggantian Panglima TNI |
| 2 | 17 Januari 2005 | SK Wapres No.1/2004 tentang Pembentukan Timnas Penangan Bencana di Aceh |
| 3 | Februari 2005 | Surat Setwapres tentang arahan Wapres agar menteri tidak anggap penting Raker dengan DPR |
| 4 | Agustus 2005 | MoU Helsinki tentang Penyelesaian kasus Aceh |
| 5 | September 2005 | *Teleconference* Presiden dari Amerika |
| 6 | 13 September 2005 | Kasus Busung lapar dan Polio |
| 7 | 17 Oktober 2005 | Kenaikan harga BBM |
| 8 | 24 Januari 2006 | Impor Beras (I) |
| 9 | 17 Oktober 2006  | Impor Beras (II) |
| 10 | 5 Juni 2007 | Dukungan pemerintah atas resolusi PBB tentang isu nuklir Iran |
| 11 | 17 Juni 2007 | Semburan Lumpur Lapindo di Sidiarjo |
| 12 | 4 Desember 2007 | Penyelesaian kasus KLBI/BLBI |
| 13 | Juni 2008 | Kebijakan antisipatif pemerintah akibat kenaikan harga BBM |
| 14 | Juni 2008 | Kenaikan harga BBM |

Sumber: Syamsuddin Haris, *Op.Cit*, hal. 8-9.

 Hak interpelasi DPR tersebut di atas, dari 14 (empat belas) kali yang diajukan hanya ada 4 (empat) yang diterima atau diteruskan. Keempat hak interpelasi dimaksud adalah kasus busung lapar dan polio, penyelesaian kasus KLBI/BLBI, kebijakan antisipatif pemerintah akibat kenaikan harga BBM, dan kenaikan harga BBM. Sisanya 10 (sepuluh) hak interpelasi tidak dilanjutkan, karena tidak disetujui oleh mayoritas anggota DPR.

Tabel 1.2. Hak Anket DPR masa Pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2008

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Waktu | Isu angket |
| 1 | 31 Mei 2005 | Kenaikan Harga BBM |
| 2 | 31 Mei 2005  | Lelang gula illegal  |
| 3 | 7 Juni 2005 | Penjualan tanker Pertamina |
| 4 | 17 Januari 2006 | Kredit macet Bang Mandiri |
| 5 | 24 Januari 2006 | Impor beras |
| 6 | 30 Mei 2006 | Pengelolaan Blok Cepu |
| 7 | Maret 2008 | Penyelesaian kasus KLBI/BLBI |
| 8 | Juni 2008 | Kebijakan energi nasional dan transparansi pengelolaan migas oleh Pertamina |

Mengapa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono relasi Presiden-DPR berada dalam format relasi yang konflik? Syamsuddin Haris mengemukakan, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi relasi Presiden- DPR yang bersifat konfliktual pada masa pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono adalah faktor institusional dan faktor institusional. Faktor institusional mencakup sistem pemilu proporsional (*proportional representation system*) yang menghasilkan sistem banyak partai yang pada gilirannya berdampak pada fragmentasi politik tanpa kekuatan mayoritas di DPR, politik kompromi dan akomodasi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperluas dukungan politik di DPR, model koalisi semu tanpa konsensus minimum di antara Presiden Bambang Yudhoyono dan partai-partai pengusung pemerintah. Faktor noninstitusional mencakup munculnya persaingan legitimasi antara Presiden Bambang Yudhoyono dan DPR, personalitas dan gaya kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang peragu, persepsi diri partai-partai di DPR selaku *watch-dog* pemerintah pasca regim-otoriter.[[6]](#footnote-5)

Penjelasan lainnya adalah modal politik yang dimiliki Presiden Bambang Yudhoyono terutama kekuatan partai pendukung utama kecil, partai-partai dimaksud adalah Partai Demokrat 55 kursi (10 %) dari total jumlah kursi DPR sebanyak 550 kursi. Kekuatan Presiden Bambang Yudhoyono memperoleh dukungan dari partai koalisi pengusung yaitui PKS dengan jumlah 45 kursi, PBB 11 kursi dan PKPI 1 kursi, koalisi dengan partai pengusung ini bersifat pragmatis hanya sebatas partai-partai pengusung dimaksud diakomodir dalam kabinet. Sementara partai-partai politik nonkoalisi adalah PDIP 109 kursi, Partai Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi. Koalisi partai utama dan partai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mencapai mayoritas sederhana di DPR.[[7]](#footnote-6)

Beberapa partai politik kemudian menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Soesili Bambang Yudhoyono. Partai-partai dimaksud adalah Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Koalisi dengan partai-partai tersebut bersifat pragmatis dan jangka pendek yakni dengan jalan mengakomodasi kepentingan partai-partai tersebut dengan mengangkat Menteri kabinet berasal dari partai-partai tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Partai Koalisi dan Partai Nonkoalisi di DPR

|  |  |
| --- | --- |
|  Partai Koalisi Presiden SBY |  Partai nonkoalisi |
| Partai Politik | Jumlah Kursi | Partai Politik | Jumlah Kursi |
| PD | 55 | PDIP | 109 |
| PKS | 45 | Partai Golkar | 129 |
| PBB | 11 | PPP | 58 |
| PKPI | 1 | PKB | 52 |
| PBR | 14 | PAN | 53 |
| Jumlah | 112 | PDS | 13 |
| Jumlah | 126 | Jumlah | 411 |

Dpr.go.id

**Dinamika Relasi Presiden-DPR Masa Pemerintahan Presiden Jokowi**

Semenjak terpilih menjadi Presiden hasil Pemilu 2014, pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengalami konflik dengan DPR. Pandangan para ilmuwan politik yang mengkhawatirkan kombinasi sistem presidensial dengan sistem banyak partai akan menimbulkan konflik antara Presiden dan parlemen dan dapat mengancam stabilitas demokrasi. Asumsi-asumsi dimaksud ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk pemerintahan Presiden Jokowi, paling tidak selama 3 (tiga) tahun pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terutama periode 2004-2009.

Beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan tersebut adalah modal politik yang dimiliki oleh pemerintahan Presiden Jokowi melalui partai koalisi di DPR yang kuat. Koalisi partai dimaksud adalah apa yang dikenal dengan istilah koalisi Indonesia Hebat (KIH). Partai yang tergabung dalam KIH adalah F-PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKB. Partai-partai ini sebagaimana diketahui merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara partai-partai yang tidak mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dalah Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS. Sementara Partai Demokrat (PD) pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperoleh 61 kursi di DPR mengambil posisi netral. Bagaimana peta kekuatan antara KIH dan KMP di Di DPR dapat dilihat pada tabel 2.

 Tabel 2

Tabel 2. Perbandingan Kekuatan KMP dan KIH di DPR

|  |  |
| --- | --- |
|  Koalisi Merah Putih (KMP) |  Koalisi Indonesia Hebat (KIH) |
| Partai Politik | Jumlah Kursi | Partai Politik | Jumlah Kursi |
| Partai Golkar | 91 | PDIP | 109 |
| Partai Gerindra | 73 | Partai NasDem | 35 |
| PPP | 39 | PKB | 47 |
| PKS | 40 | Hanura | 16 |
| PAN | 49 |  |  |
| Jumlah | 292 | Jumlah | 207 |

 Diolah dari berbagai sumber.

KIH dilihat dari segi jumlah kursi di DPR kalah bila dibandingkan dari jumlah kursi KMP. Kursi KIH tersebut sudah cukup kuat untuk membendung berbagai manufer KMP di DPR yang bertujuan untuk menghalang-halangi Presiden Jokowi dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Kondisi inilah yang disebut modal politik yang dimiliki pemerintahan Presiden Jokowi.

Faktor lainnya adalah pemerintahan Presiden Jokowi berhasil merawat dan memelihara dukungan dari partai koalisi. Cara yang ditempuh adalah dengan jalan mengganti Mentri, namun penggantinya tetap dari partai yang sama. Sebagai contoh pemerintahan Presiden Jokowi mengganti Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, dengan memasukkan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politk Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebagaimana diketahui keduanya sama-sama berasal dari partai Hanura. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan partai-partai pendukung. Hal ini juga bermakna bahwa koalisi yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek yakni mengakomodir partai politik pendukung pemerintahan dengan imbalan memberikan kepada partai dimaksud jabatan Menteri di Kabinet.

Faktor lainnya adalah pemerintahan pemerintahan Presiden Jokowi memperluas dukungan basis dukungannya dari partai-partai politik KMP kemudian bergabung dengan KIH. Partai dimaksud adalah partai Golkar. Pada acara Musyawarah Luar Biasa (Minaslub) partai Golkar tahun 2016 di Medan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan sikap, partai Golkar mendukung Presiden Jokowi untuk untuk jabatan Presiden periode 2019-2026. Sebagai imbalannya pada saat Reshuffle kabinet Jilid II pemerintahan Presiden Jokowi mengangkat seorang Menteri yang berasal dari Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian.

Sikap partai Golkar yang demikian itu dianggap sebagai ‘manuver politik yang rendah’. Mengingat Golkar merupakan partai politik urutan kedua dalam perolehan kursi DPR pada pemilu 2014. Partai Golkar selama ini dikenal merupakan partai politik yang memiliki jaringan organisasi yang luas di seluruh Indonesia, kader yang berpengalaman. Lebih dari itu, pengalaman selama ini menunjukkan, Golkar selalu memperoleh posisi Menteri di kabinet yang cukup proporsional. Perubahan sikap partai Golkar dari koalisi KMP ke KIH yang menjadi koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan imbalan hanya memperoleh 1 (satu) orang Menteri di kabinet menjadi pertanyaandi kalangan publik. Mengapa partai Golkar yang begitu besar dengan mudah mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Jokowi hanya dengan harga yang sangat murah yakni 1 (satu) orang Mentri?

Perluasan dukungan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dimaksudkan guna memperluas koalisi KIH dan sekaligus untuk mengurangi tekanan partai-partai kepada Presiden di DPR. Sikap dukungan Golkar kepada pemerintahan Presiden Jokowi, merubah peta kekuatan politik di DPR, dari jumlah kursi KIH sebagai partai koalisi pendukung di DPR kalah jumlahnya dari KMP, menjadi lebih unggul. Peta kekuatan antara KMP dan KIH di DPR setelah perubahan sikap partai Golkar dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Peta Kekuatan antara KMP dan KIH di DPR Tahun 2017

|  |  |
| --- | --- |
|  Koalisi Merah Putih (KMP) |  Koalisi Indonesia Hebat (KIH) |
| Partai Politik | Jumlah Kursi | Partai Politik | Jumlah Kursi |
|  |  | PDIP | 109 |
| Partai Gerindra | 73 | Partai NasDem | 35 |
| PPP | 39 | PKB | 47 |
| PKS | 40 | Hanura | 16 |
| PAN | 49 | Partai Golkar | 91 |
| Jumlah | 201 | Jumlah | 298 |

 Diolah dari berbagai sumber.

 Salah satu kelemahan pemerintahan Presiden Jokowi adalah Presiden Jokowi tidak memiliki posisi kunci dalam partai politik. Pengalaman pada Presiden sebelumnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, kekuatannya terletak pada posisinya di partai yaitu semuanya menjadi ketua-ketua partai atau memegang posisi kunci di partai. Kekuatan posisi kunci di partai inilah yang tidak dimiliki Presiden Jokowi. Situasi tersebut membuat Presiden Jokowi sulit menghidari usulan kebijakan-kebijakan yang datang dari ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, karena partai inilah yang menjadi partai pendukung utama Presiden Jokowi.

Posisi pemerintahan Presiden Jokowi untuk masa mendatang dilihat dari aspek relasi dengan DPR,menyelesaikan pemerintahannya, dan untuk mencalonkan lagi pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, sangat tergantung dengan hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Umum PDIP. Selain itu, kemampuannya untuk memelihara dan merawat relasinya dengan partai-partai politik pendukung. Sepanjang hubungan dengan Megawati Soekarnoputri dapat dipertahankan dan kemampuannya memelihara dukungan partai-partai lainnnya, bukan saja membuat relasi Presiden dengan DPR menjadi lebih kuat, bahkan untuk keterpilihannya menjadi Presiden untuk periode kedua kalinya pada Pemilu Presiden(Pilpres) tahun 2019 peluangnya sangat terbuka. Apalagi sampai saat ini, elite-elite menjadi saingan dari Presiden Jokowi belum muncul.

**Kesimpulan**

 Relasi pemerintahan Presiden Jokowi dengan DPR selama 3 (tiga) tahun pemerintahannya tidak mengalami masalah atau konflik dengan DPR. Fenomena ini sekaligus menepis asumsi para analis politik yang menganggap bahwa sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem banyak partai menimbulkan konflik antara Presiden dan parlemen dan membahayakan demokrasi. Faktornya adalah modal politik yakni partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang cukup kuat di DPR, kemampuan pemerintahan Presiden Jokowi untuk memelihara dukungan dari partai pendukung dengan jalan mengganti Menteri kabinet dan penggantinya tetap berasal dari partai yang sama. Faktor lainnya adalah kemampuannya memperluas dukungan dari partai politik lainnya, salah satunya adalah memperoleh dukungan dari partai Golkar.

Model koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dengan partai-partai pendukung bersifat pragmatis dan jangka pendek yakni dengan imbalan memberikan jabatan Menteri di pemerintahan kepada partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Hampir semua partai pendukung yaitu PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, dan terakhir Golkar memiliki wakil mennjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Prospek relasi pemerintahan Presiden Jokowi dengan DPR dan bahkan satabilitas pemerintahan, dan peluangnya pada Pilpres tahun 2019, tergantung pada hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Umum PDIP dan pendukung utama pemerintahan Presiden Jokowi, serta kemampuannya merawat hubungannya dengan partai-partai pendukung lainnya.

 Implikasi teori yang adalah sistem Presidensial dikombinasikan dengan sistem banyak partai dapat menimbulkan konflik dalam realsi Presiden parlemen. Konflik dimaksud dapat dihindari apabila Presiden memiliki dukungan yang kuat di parlemen, kemampuan Presiden memelihara dukungan dan menambah dukungan dari partai-partai politik. Teori Scott Minwaring yang mengatakan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem banyak partai dapat mengakibatkan munculnya konflik antara Presiden dengan parlemen dan dapat mengancam demokrasi. Teori ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi Indonesia selama 3 (tiga) tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

**Daftar Pustaka**

Haris, Syamsuddin, *Format baru Relasi Presiden-DPR dalam demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)*, Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Jakarta, 2008.

Jalal, Asran, “Membangun Hubungan kekuasaan Presiden-DPR Menuju Politik Konsolidasi”, dalam Robi Nur Hadi dan Safrizal Rambe, *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP UNAS dan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute, 2005.

Lijphart, Arend, “Introduction”, dalam Arend Lijphart (Ed), *Parliamentary Versus Government*, New York, Oxford University Press, 1992.

Mainwaring, Scott, “Presidentialisme in Latin America”, dalam Arend Lijphart (ed.) *Parliamentary versus Presidential Goverment*, New York,; Oxford University Press 1992.

1. Pokok pikiran yang disampaikan pada seminar bertema” Refleksi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK apa yang harus dirubah? Apa yang harus diperbaiki? Diselenggarakan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (HIMAJIP) UNAS pada tanggal 18 November 2017 di kampus Universitas Nasional, Jakarta, Pejaten, Pasar Minggu. [↑](#footnote-ref-0)
2. Asran Jalal, “Membangun Hubungan kekuasaan Presiden-DPR Menuju Politik Konsolidasi”, dalam Robi Nur Hadi dan Safrizal Rambe, *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP UNAS dan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute, 2005. [↑](#footnote-ref-1)
3. Data diolah dari Syamsuddin Haris, Format baru Relasi Presiden-DPR dalam demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008), Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Jakarta, 2008. [↑](#footnote-ref-2)
4. Arend Lijphart, “Introduction”, dalam Arend Lijphart (Ed), *Parliamentary Versus Government*, New York, Oxford University Press, 1992, hlm. 1-15. [↑](#footnote-ref-3)
5. Scott Mainwaring, “Presidentialisme in Latin America”, dalam Arend Lijphart (ed.) *Parliamentary versus Presidential Goverment*, New York,; Oxford University Press 1992, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-4)
6. Syamsuddin Haris, *Op.Cit*, hal. 31-43. [↑](#footnote-ref-5)
7. Data mengenai jumlah kursi partai-partai di DPR diuanggah dari dpr.go.id, diunggah pada tanggal 16 November 2017. [↑](#footnote-ref-6)